

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Simpulan Umum

Kondisi kesadaran demokrasi mahasiswa dalam organisasi BEM IKIP PGRI Pontianak telah menunjukkan adanya kesadaran dalam bersikap dan berperilaku yang demokratis dalam tataran sistem pemerintahan mahasiswa. Pembagian kekuasaan dalam pemerintahan mahasiswa, pemilihan ketua atau pimpinan organisasi yang dilakukan secara langsung, serta dengan menyelenggarakan sidang umum atau musyawarah mahasiswa secara bebas untuk menyatakan pendapatnya serta menghormati dan menghargai pendapat orang lain.

Pengembangan kesadaran demokrasi organisasi BEM IKIP PGRI Pontianak dilaksanakan dengan pendekatan persuasif. Pengembangan kesadaran demokrasi strategi melalui berbagai kegiatan yang sifatnya ilmiah. Pengembangan kesadaran demokrasi dilakukan dengan berbagai kegiatan yang dilakukan berupa kegiatan Petik sebagai langkah awal memberikan pemahaman tentang pengalaman organisasi, kegiatan Peksiorkan yang bertujuan untuk melatih kemampuan berorganisasi, kegiatan pelatihan kepemimpinan, dan seminar keorganisasian.

Berdasarkan sistem demokrasi yang dikembangkan di perlukan adanya sebuah ruang kebebasan untuk berpartisipasi sebagai perwujudan pengakuan terhadap hak yang dimiliki oleh setiap mahasiswa. Perwujudan pengakuan terhadap hak yang dimiliki mahasiswa meliputi adanya kesempatan dalam mengemukakan pendapat oleh pengurus, adanya kebebasan untuk berkelompok dan berorganisasi bagi para pengurus, adanya rasa saling percaya dan sikap saling menghargai, ada prinsip persamaan kedudukan di dalam organisasi, dan kesempatan yang sama dalam bagi mahasiswa.

2. Simpulan Khusus

a. Kondisi kesadaran demokrasi

Kondisi kesadaran demokrasi BEM IKIP PGRI Pontianak terlihat pada:

1). Realitas kebebasan menyatakan pendapat

Kondisi kesadaran demokrasi mahasiswa dalam organisasi BEM IKIP PGRI Pontianak menunjukkan adanya kesadaran dalam bersikap dan berperilaku yang demokratis dalam tataran sistem pemerintahan mahasiswa. Hal ini ditandai dengan adanya sebuah ruang kebebasan untuk menyampaikan pendapat bagi para pengurus dalam forum rapat kerja.

2). Realitas kebebasan berkelompok

Kebebasan berkelompok dalam organisasi BEM IKIP PGRI Pontianak diperlukan untuk membentuk organisasi yang lebih kompeten. Mahasiswa diberikan kebebasan dan ruang untuk melakukan sebuah perkumpulan guna pengembangan minat dan keterampilan. Mahasiswa tidak hanya mengikuti organisasi yang ada di dalam kampus melainkan juga organisasi yang diluar kampus atau ekstrakampus.

3). Realitas kebebasan berpartisipasi

Setiap pengurus dalam organisasi BEM IKIP PGRI Pontianak diberikan kebebasan berpartisipasi yang seluasnya. Kesempatan yang sama antar pengurus dalam melakukan berbagai kegiatan dan kontribusi dalam pemikiran.

4). Kesetaraan antarwarga (pengurus dan anggota)

Kesetaraan antarwarga (pengurus dan anggota) itu berupa adanya kesempatan yang sama bagi setiap pengurus dalam organisasi BEM IKIP PGRI Pontianak tanpa membedakan etnis, bahasa, daerah maupun agama dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada pengurus untuk terlibat dalam kepengurusan dengan tidak memandang latar belakang seseorang.

5). Rasa percaya (*Trust*)

Rasa saling percaya yang dimiliki oleh pengurus BEM IKIP PGRI Pontianak terlihat tidak terjadi sebuah kecurigaan dengan pengurus BEM yang lainnya sehingga kegaitan yang berjalan secara baik dan lancar dan rasa saling percaya antar sesama pengurus sudah terbentuk dengan baik.

Moad, 2014

Pengembangan Kesadaran Demokrasi Dalam Organisasi Mahasiswa

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

6). Kerja sama

Terjalannya kerjasama dalam jajaran kepengurusan BEM IKIP PGRI Pontianak. Kerjasama yang dimaksud disini adalah kerjasama dalam hal kebajikan. Kerja sama hanya mungkin terjadi jika setiap orang atau kelompok bersedia untuk mengorbankan sebagian dari apa yang diperoleh dari kerjasama tersebut. Kerjasama bukan berarti menutup munculnya perbedaan pendapat antarindividu atau antar kelompok.

b. Proses pengembangan kesadaran demokrasi

Proses pengembangan kesadaran demokrasi mahasiswa BEM IKIP PGRI Pontianak meliputi:

1). Strategi pengembangan kesadaran demokrasi

Strategi pengembangan kesadaran demokrasi organisasi BEM IKIP PGRI Pontianak dengan cara membagi tugas dan tanggung jawab kepada pengurus sesuai dengan kemampuan. Strategi berikutnya ialah dengan memberikan keleluasaan kepada pengurus untuk mengikuti organisasi baik itu organisasi kampus maupun organisasi di luar kampus, sehingga pengurus mendapatkan pengalaman organisasi yang lebih matang.

2). Proses pengembangan kesadaran demokrasi

Proses pengembangan kesadaran demokrasi pengembangan kesadaran demokrasi di organisasi BEM IKIP PGRI Pontianak dengan melakukan kegiatan penalaran, pelatihan kepemimpinan dan pengkaderan serta kegiatan ilmiah.

3). Efektifitas pengembangan kesadaran demokrasi

Efektifitas kegiatan yang dilakukan oleh BEM IKIP PGRI Pontianak dalam pengembangan kesadaran demokrasi mampu meningkatkan kesadaran pengurus dalam berdemokrasi dan meningkatkan kinerja pengurus dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.

c. Kendala pengembangan kesadaran demokrasi

Kendala dalam pengembangan kesadaran demokrasi di BEM IKIP PGRI Pontianak meliputi :

1). Rendahnya kontribusi mahasiswa

Mahasiswa yang berpartisipasi dalam organisasi di BEM IKIP PGRI Pontianak jumlahnya relatif kecil. Terlihat pada sangat sedikit mahasiswa yang terlibat pada program pengembangan penalaran dan keilmuan; bakat, minat, organisasi dan kepemimpinan, kesejahteraan, kepedulian sosial.

2). Dukungan kampus dalam kegiatan mahasiswa

Kendala yang dihadapi dalam pengembangan kesadaran demokrasi dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi mahasiswa terutama dalam kepengurusan BEM yakni keterbatasan dana untuk melakukan kegiatan walaupun sesungguhnya lembaga telah memberikan bantuan finansial.

d. Upaya pengembangan kesadaran demorasi

Upaya pengembangan kesadaran demokasri di BEM IKIP PGRI Pontianak dilakukan dengan cara:

1). Kegiatan pengkaderan

Kegiatan pengkaderan bertujuan untuk mengembangkan kecakapan mahasiswa terhadap organisasi. Upaya pengkaderan anggota merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk menciptakan kader kepengurusan yang memiliki kemampuan berorganiasi.

2). Pelatihan kepemimpinan

Kegiatan pelatihan kepemimpinan yang dilakuan memberikan sebuah pengalam berorganisasi kepada mahasiswa sehingga jika mereka bergabung kedalam organisasi BEM mampu secara mudah untuk bisa bekerja sama dengan pengurus lainnya. Organisasi mahasiswa perlu secara terprogram kearah memperkuat nilai-nilai kepemimpinan.

3). Optimalisasi sarana dan prasarana kampus

Optimalisasi pemanfaatan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana serta memperluas akses informasi terkait dengan kegiatan yang dilakukan yang digunakan dalam pengembangan dan aktualisasi diri mahasiswa.

4). Meningkatkan peran kemahasiswaan dalam pembinaan mahasiswa

Pihak kemahasiswaa kampus IKIP PGRI Pontianak juga berupaya dengan bentuk sebuah pola pembinaan yang operasional dengan langkah-langkah yang

jasas untuk memaksimalkan peran kemahasiswaan dan peran ormawa dalam melakukan pendidikan demokrasi bagi mahasiswa. Pembinaan lain juga dengan membuka ruang komunikasi dari pihak ketiga sebagai penyedia dana untuk turut memberikan sumbangsih dalam kegiatan mahasiswa. Terutama instansi yang terlibat dan bekerja sama dengan kampus IKIP PGRI Pontianak.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah

- a. Adanya koordinasi antara pemerintah dengan pihak institusi kampus dalam pengembangan demokrasi dalam organisasi kemahasiswaan yang kemudian mensosialisasikannya kepada mahasiswa fungsi organisasi kemahasiswaan sebagai wahana internalisasi nilai-nilai demokrasi.
- b. Pendidikan demokrasi yang dilaksanakan dikampus berdasarkan Kepmendikbud. No 155/1998 tentang pedoman organisasi mahasiswa. Aturan yang harus mendapat perhatian terutama pada pasal 2, bahwa oragnisasi di perguruan tinggi diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh dan untuk mahasiswa dengan memberikan peranan dan keleluasaan lebih besar kepada mahasiswa. Aturan ini sangat berpotensi terhadap kesalahpahaman antara perguruan tinggi dan organisasi mahasiswa dalam pembinaan keorganisasian sehingga perlu sosialisasi yang lebih maksimal.

2. Bagi IKIP PGRI Pontianak

- a. Peraturan-peraturan terkait dengan organisai mahasiswa hendaknya disosialisasikan secara optimal agar tidak terjadi miskomunikasi antara kampus dan organisasi mahasiswa.
- b. Perlunya sebuah upaya yang lebih intensif berupa sosialisasi mengenai paran dan fungsi oragniasi keorganisasi kampus dari pembina kemahasiswaan dalam upaya meningkatkan jumlah mahasiswa yang berkontribusi secara aktif dalam mengikuti berbagai kegiatan yang akan dilakukan oleh organisasi mahasiswa.
- c. Institusi kampus memiliki tanggungjawab dalam memfasilitasi kegiatan kemahasiswaan, salah satunya adalah menyediakan anggaran dana yang *refresentatif* untuk kegiatan kemahasiswaan.

3. Bagi BEM IKIP PGRI Pontianak

- a. Organisasi kemahasiswaan sebagai wahana pengembangan kesadaran demokrasi harus dapat mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi dalam sebuah organisasi kemahasiswaan seperti adanya pembagian kewenangan, dan tanggungjawab dalam kepengurusan dan kegiatan.
- b. Perlu ditingkatkan kembali koordinasi dan kerjasama antara BEM IKIP PGRI Pontianak dengan ormawa tingkat Program Studi dan Unit Kerja Mahasiswa agar organisasi mahasiswa di kampus dapat berjalan sejalan.
- c. Upaya yang secara serius dan berkelanjutan dalam pengembangan kesadaran demokrasi dan internalisasi nilai-nilai demokrasi melalui kegiatan pengembangan *interpersonal skills* dan *intrapersonal skills* dengan mengikuti kegiatan seminar dan diskusi.
- d. Perlunya sosialisai yang melibatkan seluruh HIMA tingkat program studi agar informasi lebih luas dan cepat kepada seluruh mahasiswa.
- e. Partisipasi mahasiswa dalam kegiatan-kegiatan organisasi, untuk itu perlu ditingkatkan sosialisasi kepada seluruh mahasiswa dengan memanfaatkan fasilitas yang dimiliki kampus seperti mading, buletin kampus dan media informasi yang dimiliki kampus.
- f. Perlunya sebuah kerjasama dengan pihak luar kampus yang dapat memberikan bantuan dana seperti perbankan, Dinas Sosisial dan organisasi masyarakat yang tidak memilki muatan kepentingan politik praktis sehingga tidak ada lagi pungutan bayaran kepada mahasiswa yang ingin mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh BEM.
- g. Perlunya sebuah perencanaan yang terorganisir secara baik untuk melakukan berbagai kegiatan, sehingga kendala operasinal yang terjadi menjadi lebih dapat diminimaisir, terutama yang berkaitan dengan pembiayaan kegiatan dan proses perizinan untuk melakukan kegiatan.

4. Bagi Ormawa di IKIP PGRI Pontianak Pada Umumnya

- a. Kaderisasi merupakan hal fundamental dalam mengembangkan kinerja oragnisasi mahasiswa, untuk itu kaderisasi harus dilaksanakan secara,

berkesinambungan dan mempunyai arah yang jelas berdasarkan karakteristik organisasi.

- b. Kaderisasi dalam organisasi kemahasiswaan harus dapat meningkatkan kedisiplinan mahasiswa, terbebas dari kepentingan individu dan atau golongan. Organisasi mahasiswa bertujuan untuk peningkatan wawasan, pengetahuan, bakat dan kemampuan mahasiswa.
- c. Kaderisasi harus disampaikan pemahaman-pemahaman terkait tujuan organisasi, fungsi organisasi, dan sebagainya yang dapat mendukung tercapainya misi organisasi.
- d. Kegiatan yang dilakukan hendaknya dapat dirasakan oleh segenap mahasiswa, sehingga nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam kegiatan tersebut dapat berkembang di mahasiswa dan juga mahasiswa merasakan keberadaan BEM sebagai wadah aspirasi mahasiswa yang independen.

5. Bagi Mahasiswa IKIP PGRI Pontianak

- a. Sebagai mahasiswa yang harus memiliki berbagai kemampuan dan pengetahuan yang luas, maka mahasiswa harus membudayakan tradisi membaca, menulis dan diskusi guna meningkatkan pengembangan diri mahasiswa.
- b. Agar kemampuan mahasiswa lebih terasah, maka minat dan bakat mahasiswa harus disalurkan dengan mengikuti berbagai kegiatan organisasi mahasiswa di kampus seperti organisasi mahasiswa BEM dan himpunan mahasiswa (HIMA) tingkat prodi serta unit kerja mahasiswa (UKM).

6. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Jumlah sampel hendaknya bisa diperluas dengan meneliti lebih dari satu kampus agar informasi yang diperoleh lebih bervariasi.
- b. Proses pengumpulan informasi dilakukan secara lebih cermat sehingga informasi yang diperoleh lebih komprehensif.
- c. Peneliti selanjutnya dapat meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kesadaran demokrasi mahasiswa, seperti efektifitas penggunaan sarana dan prasarana kampus, manajemen organisasi organisasi

mahasiswa, serta efektifitas kebijakan yang di terapkan oleh kampus dalam pembinaan mahasiswa.

- d. Pendekatan penelitian dapat dilakukan dengan pendekatan kuantitatif jika subjek penelitian dengan lebih dari satu kampus agar peneliti dapat lebih efektif memanfaatkan waktu.